

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PADA DPPKA KOTA MOJOKERTO**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma III
Jurusan Akuntansi**



Oleh :

HALIMAH SEPTIANY DWI RUDYANTORO

NIM : 2014410980

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017**

ARTIKEL ILMIAH

Nama : Halimah Septiany Dwi Rudyantoro
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto. 28 September 1994
NIM : 2014410980
Program Pendidikan : Diploma III
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada DPPKA Kota Mojokerto

Disetujui dan Diterima baikoleh :

Pjs. Ketua Program Diploma

Dosen Pembimbing

Tanggal : 11 Sep 2017.....

Tanggal : 11 Sep 2017.....



Putri Wulanditya, SE, M.Ak., CPSAK Putri Wulanditya, SE, M.Ak., CPSAK

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA DPPKA KOTA MOJOKERTO

Halimah Septiany Dwi Rudyantoro
STIE Perbanas Surabaya
e-mail : tamaima97@gmail.com
Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya

ABSTRACT

The current government continues to improve the performance system in achieving a good governance (good governance). This is done one of them by performing better public administration management and in line with the implementation of regional autonomy. This writing aims to evaluate the budget realization report on revenue and expenditure at DPPKA Mojokerto. This research was conducted through interviews on the budget and treasury department of staff DPPKA Mojokerto and the report of budget realization report for completeness as proof of recording of budget realization report. The results of this study indicate that the realization of income (more difference) is able to exceed the established budget and the realization of expenditure is also efficient because it is able to realize the budget without exceeding the budget limit set at DPPKA Mojokerto.

Keywords: Budget Realization Report; Income; Budget

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia terus meningkatkan sistem kinerja dalam mencapai pemerintahan yang baik Hal tersebut dilaksanakan salah satunya dengan melakukan pengelolaan administrasi publik yang lebih baik dan sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada unit pemerintahan yang lebih kecil, antara lain Kabupaten/Kota. Atas dasar tersebut setiap aparatur atau unit pemerintahan yang lebih kecil diharuskan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Semua ini berdampak pada tuntutan yang tinggi terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah, mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Ukuran kinerja yang tidak hanya menggunakan satu ukuran saja dan perlu menggunakan

beberapa ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda juga. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam unit kerja (Mardiasmo, 2009 : 1).

Menganalisa kinerja pemerintahan daerah dalam APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari suatu periode untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga pemerintah dapat mengetahui kecenderungan yang terjadi. Dengan menganalisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, dan mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan pemerintah dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Abdul Halim, 2007 : 20).

Manajemen keuangan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah salah satunya yang memiliki kewajiban mengelola keuangan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, APBD juga ditetapkan menggunakan peraturan daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai akhir tahun 31 Desember.

mengelola keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan organisasi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, perencanaan kerja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerjanya. Salah satunya merupakan perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya.

Perencanaan anggaran daerah sangat penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan agar anggaran yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, dan untuk membiayai semua kebutuhan yang dijalankan serta dapat terealisasikan dengan sesuai yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sudah terealisasi dari rencana anggaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari perencanaan anggaran, karenanya laporan tersebut akan memberikan informasi mengenai hasil yang telah berhasil atau tidaknya kinerja pemerintah yang

berdasarkan realisasi APBD. Informasi tersebut yang nantinya akan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun selanjutnya.

Anggaran merupakan salah satu instrumen yang cukup berperan penting dalam organisasi sektor publik, karena sifatnya partisipatif. Hal ini dapat melibatkan masyarakat dan perencanaannya, agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam anggaran.

METODE PENELITIAN

Merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, antara lain mengumpulkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014 – 2016 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dan melakukan perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan APBD, di antaranya

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti di sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan yang menjadi tertutup dengan pihak luar, di sektor publik anggaran merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh publik untuk dapat mengetahuinya, diberitahukan dikritisi, dan dapat diperdebatkan. Anggaran publik yang merupakan

Anggaran juga diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat untuk melaksanakan rencana kegiatan yang sudah dibentuk, baik mengenai perolehan pendapatan dan belanja daerah. Pada DPPKA Kota Mojokerto sering terjadi kelebihan atau kekurangan anggaran belanja daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan defisit atau surplus sehingga berpengaruh pada periode berjalan berikutnya.

menggunakan rasio seperti: analisis varians (selisih) pendapatan, analisis belanja langsung, analisis belanja tidak langsung dan analisis efisiensi belanja. Dan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dan dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga akan mendapatkan hasil yang diketahui, dengan bagaimana efisiensi kinerja yang telah terjadi pada kinerja realisasi belanja.

suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, aktivitas, dan belanja. (Mardiasmo, 2009 : 56). Secara umum, tujuannya disusun suatu anggaran ialah kebutuhan jangka pendek yang sudah tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran juga menuntun agar tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Pada umumnya usia anggaran satu tahun bertujuan

agar anggaran memungkinkan melakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi dalam peraturan pemerintah serta faktor eksternal lainnya.

Manfaat anggaran pada perusahaan merupakan alat yang membantu manajemen dalam pelaksanaan, koordinasi, fungsi perencanaan, pengawasan dan sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan semua aktifitas operasi atau transaksi-transaksi yang dilakukan suatu

Fungsi Perencanaan

Perencanaan antara lain merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan dari fungsi manajemen lainnya. Perencanaan ini meliputi tindakan yang memilih dan dapat menghubungkan fakta, dan menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan melalui anggaran. Pengawasan ini merupakan cara yang ditempuh agar rencana yang telah tersusun sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Demikian pengawasan merupakan dengan cara membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, kemudian apakah dapat ditemukan efisiensi atau para manajer pelaksana sudah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan antara lain bukan mencari kesalahan akan tetapi juga dapat mencegah dan mampu memperbaiki kesalahan. Pengawasan juga memiliki fungsi yang sering disalah artikan antara lain mencari kesalahan orang lain atau digunakan sebagai alat menjatuhkan hukuman dan kesalahan yang dibuat pada pengawasan bertujuan untuk menjamin tercapainya suatu rencana dan tujuan perusahaan.

entitas pelaporan keuangan daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan harus menyakut semua informasi

yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan perasangka negatif dari pihak luar dan laporan keuangan yang disajikan tersebut relevan, dapat dipahami, dan dapat dimengerti untuk tujuan pengambilan keputusan.

Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain

meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akruwal

Sebelum diterapkan SAP Berbasis Akruwal terlebih dahulu dilakukan penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal secara bertahap. SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruwal. Aturan terkait penerapan SAP Berbasis Akruwal yang dilakukan secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penerapan SAP Berbasis Akruwal secara bertahap dilakukan dengan

memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. Sama seperti diatas SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal juga dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Aturan ini tercantum Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruwal belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruwal menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal dimana SAP mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal. Selain itu juga mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Seperti yang disebutkan diatas SAP yang telah

dibuat dilengkapi juga dengan PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Nah PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrua ini tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP Berbasis Akrua dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan

Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan Daerah dan Belanja

Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva atau pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi ekuitas pemerintah daerah dan terdapat rasio pendapatan sebagai berikut :

Analisis Pendapatan=

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau terjadinya utang yang mengakibatkan kekurangannya ekuitas dana. Menurut Halim (2007 : 52) definisi atau pengertian belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran terdapat rasio belanja sebagai berikut

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

GAMBARAN PENELITIAN

SUBYEK

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto organisasi atau perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi pemerintahan. Jadi dari penjelasan judul secara keseluruhan merupakan untuk mengurai, mengolah, dan menganalisa secara sistematis dan objektif mengenai pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Mojokerto. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto untuk terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset / barang daerah.

Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintah yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar

yakni pengelolaan keuangan daerah yang menurut alokasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Juga permasalahan manajemen keuangan sektor publik yang selama ini belum dapat ditangani secara keseluruhan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. DPPKA melakukan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan unit Pelaksanaan Teknis dinas (UPTD). Setiap SKPD dan UPTD di wilayah Kota Mojokerto membuat catatan mengenai semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannya. Hasilnya berupa laporan kegiatan pengelolaan keuangan yang iserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dikoordinasi. Pelaksanaan koordinasi didasarkan atas kegiatan SKPD dan UPT mengenai pengelolaan keuangannya. Hasil dari koordinasi dapat berupa laporan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan APBD dan laporan pertanggung jawaban dari realisasi APBD Kota Mojokerto

PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih

antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarkan. Pada saat selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Untuk mengetahui kinerja pendapatan dapat menggunakan

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan. Berikut ini rumus dan perhitungan analisis dari Pendapatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014-2016 :
 Realisasi Pendapatan daerah
 $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{37.704.517.897,00}{28.131.660.200,00} \times 100\% = 134\% - 100\% = 34\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{49.485.314.903,40}{34.253.793.727,00} \times 100\% = 144\% - 100\% = 44\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{49.165.388.494,11}{34.573.031.400,00} \times 100\% = 118\% - 100\% = 18\%$$

langsung). Untuk mengetahui kinerja keserasian belanja dapat menggunakan Analisis Keserasian

Analisis Varians, secara umum dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan DPPKA Kota Mojokerto dapat dikatakan kurang baik karena semua melampaui dari yang telah di anggarkan. Hal ini di tunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2014-2016 yang mencapai anggran rata-rata 32%. Persentase paling rendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 18%. Dari sisi komponen pendapatan DPPKA Kota Mojokerto, realisasi pendapatan aslidaerah masih sangat jauh dari apa yang telah di anggarkan. Pada ketiga tahun tersebut persentasenya adalah 34% , 44% , 18%. Varians pendapatan selama 3 tahun hasilnya lebih target pada DPPKA sudah terpenuhi karena telah melebihi anggaran yang sudah ditetapkan.

Analisis Keserasian Belanja
 Analisis keserasian belanja dibedakan menjadi 2, yaitu analisis keserasian belanja modal (belanja langsung) dan analisis keserasian belanja operasi (belanja tidak langsung). Untuk mengetahui kinerja keserasian belanja dapat menggunakan Analisis Keserasian Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja Langsung
 $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{10.149.112.253,00}{24.191.723.902,00} \times 100\% = 42\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{13.115.023.763,00}{32.267.824.048,00} \times 100\% = 41\%$$

$$\begin{aligned} & 12.581.400.256,00 \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{\quad}{33.642.828.556,00} \times 100\% \\ &= 37\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tidak Langsung} \\ \text{Tidak Langsung} &= \frac{\quad}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \\ & 14.042.611.649,00 \\ \text{2014} &= \frac{\quad}{24.191.723.902,00} \times 100\% \\ &= 63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 58\% \\ & 19.152.800.285,00 \\ \text{2015} &= \frac{\quad}{32.267.824.048,00} \times 100\% \\ &= 59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 21.061.428.300,00 \\ \text{2016} &= \frac{\quad}{33.642.828.556,00} \times 100\% \\ &= 63\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut dapat terlihat bahwa untuk tahun 2016 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Rasio belanja langsung relatif lebih kecil dibandingkan rasio belanja tidak langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu 40% sedangkan untuk belanja tidak langsung yaitu sebesar 60%. Dalam belanjanya untuk belanja operasi atau belanja tidak langsung dengan persentase masing-masing adalah 58%, 59%, 60% Belanja operasi dengan alokasi sebesar rata-rata 60% digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dan komponen belanja operasi belanja pegawai menyerap APBD yang besar, sedangkan untuk belanja modal atau belanja langsung hanya sebesar masing-masing 42%, 41%, 37% jumlah ini jauh lebih kecil dari presentase yang digunakan untuk biaya modal yang hanya rata-rata 40% dari total belanja DPPKA Kota

Mojokerto, belanja modal tersebut digunakan untuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran / belanja daerah dengan anggaran belanja daerah dan mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaiknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{24.191.723.902,00}{26.405.069.807,00} \times 100\%$$

$$= 92 \%$$

$$2015 = \frac{32.267.824.048,00}{37.622.233.086,00} \times 100\%$$

$$= 86\%$$

$$2016 = \frac{33.642.828.556,00}{34.988.070.000,00} \times 100\%$$

$$= 96\%$$

Perhitungan diatas terlihat bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Mojokerto telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2016 berada di

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini yaitu dalam periode anggaran realisasi pendapatan dan belanja pada DPPKA Kota Mojokerto tahun anggaran 2014-2016 dengan menggunakan Analisis Varians yaitu : Berdasarkan hasil analisis Varians Pendapatan Daerah tahun 2014-2016 menunjukkan pendapatan pada DPPKA Kota Mojokerto termasuk dalam kategori

bawah 100% dengan persentase rata-rata 96%. Dari table diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Mojokerto berdasarkan Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah yang dikeluarkan YPAPI (Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia) dapat dikatakan sudah sangat baik / efisien dalam melakukan realisasi belanjanya dan terbukti dengan rata-rata rasio yang sebesar 91%. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besardari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik bagi DPPKA Kota Mojokerto dan harus dalam pengawasan yang baik atas penyusunan program dan anggaran dari DPPKA Kota Mojokerto.

baik karena secara keseluruhan memiliki selisih lebih berarti telah mampu mencapai target pendapatan bahkan melebihi yang sudah ditetapkan. Pada 3 tahun terakhir mendapat selisih sebesar 134%, 144%, 118% selisih lebih dari pendapatan diperoleh dari pendapatan daerah yaitu pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah dari keempat komponen tersebut yang memiliki selisih lebih tertinggi ari pada pajak daerah dan Kinerja belanja pada DPPKA Kota

Mojokerto dilihat dari analisis Varians secara umum kinerjanya dapat dikatakan sudah baik pada tahun anggaran 2014-2016 pada DPPKA Kota Mojokerto untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhannya sudah baik dan efektif karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan, banyak program yang terealisasi dan sesuai anggaran yang direncanakan dan semua program yang sudah terealisasi. Sementara untuk tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung dari periode 2014-2016 sudah efisien, karena keseluruhan dari anggaran belanja tidak langsung tidak melampaui anggaran yang direncanakan. Dapat diketahui bahwa anggaran belanja sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi sehingga setiap tahun hasilnya akan berbeda-beda.

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi pada DPPKA Kota Mojokerto yaitu

Implikasi Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dapat dikatakan berjalan sesuai anggaran yang telah ditentukan. Bahkan pada pendapatan terdapat selisih lebih yang melebihi anggaran pendapatan. Sehubungan dengan hal ini penelitian memberikan implikasi, adapun implikasi penelitian antara lain :

Kepala DPPKA Kota Mojokerto

Mengkoordinasi dan menjalain hubungan kerja yang baik dengan pegawai DPPKA Kota Mojokerto tentang peningkatan

perlu lebih berusaha lagi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi daerah dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. diharapkan dapat meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan DPPKA maupun serta masyarakat Kota Mojokerto dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun anggaran agar tercipta keterpaduan, integritas, dan transparansi dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang berbudaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto agar meningkatkan pengawasan kepada pegawai mengenai anggaran belanja yang dikeluarkan agar supaya pengeluarannya bisa teratur sesuai anggaran belanja yang dilakukan setiap tahun periode berjalan.

realisasi pendapatan dan belanja, agar tercapai income pendapatan yang maksimal dan outcome kinerja di dalam belanja skpd yang rasional, efektif dan efisien.

Bidang Pendapatan dan Anggaran Belanja

Bidang pendapatan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah sehingga tercapai pemenuhan target yang maksimal dan pada bidang anggaran belanja melaksanakan penganggaran pendapatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dengan tim anggaran kota dan DPRD Kota Mojokerto. Serta koordinasi

dengan skpd untuk penganggaran belanja yang sesuai dengan rencana

kebutuhan ataupun rencana kerja

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Ananda, Chitra., "Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011". Universitas Gunadarma.
- Assidiqi, Bahrn "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012". Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto : *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016*. Mojokerto
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. 2015. *Profil DPPKA Kota Mojokerto Tahun 2015*. Mojokerto.
- Indra Bastian 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Erlangga
- Kainde ,Christian., "Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung". Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Kasim, Muh. Yunus Dan K. Bidin, Cici Rianty., "Analisis Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Morowali Pada Periode Tahun 2011-2015". *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*. Januari 2017.
- Kusnul Kotimah. 2012. "Analisis Kinerja APBD Kota Surabaya". TA Diploma tidak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : UUP STIM YKPN
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Mustafa, Santiadji Dan Anugranita, Dwi Ananda., "Analisis Varians Anggaran Pendapatan Dan Biaya (Studi Pada Pd. Pasar Kota Kendari"

- Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.
- Nordiawan, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- M. Faqihudin, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik”. Universitas Pancasakti Tegal.
- Redaksi Sinar Grafika. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafik
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rasdianto, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah, Berbasis Akrua*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliana, “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Apbd) Ditinjau Dari Rasio Keuangan”. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

